

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Stakeholder Theory

Freeman (1984) berpendapat bahwa *stakeholder* adalah seseorang atau sekelompok orang yang dipengaruhi dan mempengaruhi proses perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Ghozali (2020) mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* perusahaan (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat dan pihak lain).

Dengan demikian suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan lain yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut.

(Clarkson, 1995) Mengkategorikan *Stakeholder* menjadi dua, yaitu *Primary dan Secondary*. *Primary stakeholder* merupakan *stakeholder* yang secara resmi mempunyai relasi kontraktual dengan perusahaan. Klien perusahaan, pemasok barang perusahaan, dan karyawan perusahaan merupakan contoh dari pemangku kepentingan yang termasuk dalam *primary stakeholder*. Sedangkan *secondary stakeholder* merupakan *stakeholder* yang tidak mempunyai kontrak secara resmi dengan perusahaan. Contoh dari *secondary stakeholder* adalah aparat pemerintah, media masa, dan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan.

Deegan (2000) *Power Stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya kekuatan yang mereka miliki atas sumber. *Power* dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi terbatas (modal dan tenaga kerja), kemampuan untuk mengatur atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan.

Perusahaan memiliki cara untuk mengelola *stakeholder* tergantung pada strategi perusahaan . perusahaan yang memiliki strategi yang aktif akan mempengaruhi hubungan organisasi dengan *stakeholder* yang di anggap berpengaruh (Ullman,1985)

Strategi aktif tidak hanya mengidentifikasi *stakeholder* tetapi juga menentukan *stakeholder* mana yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi

alokasi sumber ekonomi ke perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan dengan strategi pasif cenderung tidak terus menerus memonitor aktivitas *stakeholder* dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal untuk menarik perhatian *stakeholder*. Kurangnya perhatian terhadap *stakeholder* akan mengakibatkan rendahnya kinerja sosial perusahaan. Atas argument yang tersebut, Penelitian inidi dasari *Stakeholder Theory*. Dalam UMKM dapat dikatakan semuanya adalah *stakeholder*.

“ (Wahyudiono, 2018) Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem kewenangan yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan sektor UMKM di Indonesia, birokrasi dengan segala fungsi dan perannya sangatlah diperlukan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnyasektor UMKM. ”

Birokrasi memiliki keterlibatan akan keberadaan UMKM dapat memberikan arah yang jelas bagi perkembangan UMKM di Indonesia di masa- masa mendatang. Dalam hal ini pemerintah dan dinas-dinas terkait selaku regulator. Baik pelaksanaan tugas maupun alokasi anggaran yang tersedia.

Stakeholder memiliki peran dari kalangan birokrasi ini yaitu membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya memberikan dampak positif dalam kemudahan sektor UMKM dan mengembangkan unit usahanya. Birokrasi menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, serta dapat menjaga kestabilan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM.

(Wahyudiono, 2018) Dalam pengembangan sektor UMKM, terdapat minimal keterlibatan 3 *stakeholder* yang berkontribusi agar sektor UMKM ini dapat berkembang dan mandiri secara ekonomi, antara lain kalangan *Academic, Business, and Government* (ABG). Kolaborasi ini sering dikenal dengan model *Triple Helix*

Academic memiliki peran sebagai konsultan dan menjadi aktor dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau ekonomi berbasis pengetahuan. *Business* adalah entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. *Government* atau Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penciptaan pasar.

Model *Triple Helix* pada kalangan bisnis berperan sebagai *enabler*. Bisnis

merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Bisnis berperan sebagai enabler yang menghadirkan infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan mendukung perubahan pada sumber daya manusia, proses bisnis dan produk yang dihasilkan ke era digital.

2.1.2 Standard Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan adalah pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), Yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta regulator untuk entitas yang berada dalam pengawasannya.

Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dan di sahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 Mei 2016. SAK EMKM berlaku secara efektif untuk Penyusunan laporan keuangan yang dimulai tanggal 1 Januari 2018

Berdasarkan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) maka standar ini dimaksudkan untuk:

1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dimaksudkan untuk entitas, mikro, kecil, dan menengah.
2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dapat digunakan untuk entitas yang tidak memenuhi kriteria Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah Dasar Akrual dan kelangsungan usaha. Laporan Keuangan yang disusun dengan dasar Akrual akan menghasilkan informasi yang lebih mempresentasikan dengan kondisi dan aktivitas bisnis dalam periode tersebut.

Saat ini penyusunan laporan keuangan mengacu pada SAK EMKM. Tujuan dari laporan keuangan ini:

1. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan bagi sejumlah besar pengguna.
2. Pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan

kepadanya

SAK EMKM disusun cukup sederhana dan tidak menyulitkan penggunaannya yang merupakan usaha yang tergolong kecil dan menengah. Dalam penyusunan SAK EMKM mempertimbangkan peraturan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu diharapkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Perusahaan dapat menjadikan SAK EMKM sebagai dasar dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

SAK EMKM diharapkan menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia. Selain itu SAK EMKM diharapkan menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman atau pedoman akuntansi untuk UMKM yang bergerak di berbagai sektor usaha.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum finansial bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, investor, saham, dll. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:
 - a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
 - b. Entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang, dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

SAK EMKM disusun cukup sederhana dan tidak menyulitkan penggunaannya yang merupakan usaha yang tergolong kecil dan menengah. SAK EMKM terdiri dari Laporan Laba rugi, Laporan posisi keuangan dan Catatan atas laporan keuangan. SAK EMKM hanya memuat 3 laporan berikut.

1. Laporan laba rugi

Laporan Laba rugi adalah Laporan utama dalam mengukur kinerja suatu usaha. Laporan laba rugi terdiri dari, Pendapatan dan beban pada periode tertentu. Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk

memahami kinerja keuangan entitas.

Toko.....		
Laporan Laba Rugi		
31 Desember 20X1 dan 20X0		
	20x1	20x0
Pendapatan		
Pendapatan Usaha	Xxx	Xxx
Pendapatan Lain-Lain	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Jumlah Pendapatan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Beban		
Beban Usaha	Xxx	Xxx
Beban Lain-Lain	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Jumlha Beban	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Laba (Rugi)	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

Sumber,SAK EMKM 2016

2. Laporan posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan terdiri dari tiga bagian, yaitu Aset, liabilitas , dan Ekuitas.

Toko.....		
Laporan Posisi Keuangan		
31 Desember 20X1 dan 20X0		
	20x1	20x0
Aset		
Kas	Xxx	Xxx
Perlengkapan	Xxx	Xxx
Persediaan	Xxx	Xxx
Aset Tetap	<u>Xxx</u>	<u>Xxx</u>
Jumlah Aset		

Liabilitas		
Hutang Lancar	Xxx	Xxx
Hutang Jangka Panjang	<u>Xxx</u>	<u>Xxx</u>
Jumlah Liabilitas	<u>Xxx</u>	<u>Xxx</u>
Ekuitas		
Modal	Xxx	Xxx
Saldo Laba	<u>Xxx</u>	<u>Xxx</u>
Jumlah Ekuitas	<u>Xxx</u>	<u>Xxx</u>
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	<u><u>Xxx</u></u>	<u><u>Xxx</u></u>

Sumber, SAK EMKM 2016

3. Catatan atas Laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan ini memberikan informasi tentang suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas.

2.1.3 Perbedaan SAK EMKM dengan SAK ETAP

ETAP yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Standar yang digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP dijadikan sebagai tolak ukur untuk suatu badan usaha kecil dalam menyusun laporannya. SAK ETAP disusun berdasarkan PSAK IFRS, namun telah disederhanakan dan disesuaikan sesuai kondisi di Indonesia. SAK ETAP lebih mudah diimplementasikan oleh UMKM dibandingkan PSAK IFRS. Beberapa penyederhanaan yang terdapat dalam SAK ETAP yaitu: (a) tidak ada laporan laba rugi komprehensif; (b) menggunakan harga perolehan, tidak menggunakan pilihan nilai wajar revaluasi atau nilai wajar; (c) tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan.

Di sisi lain, ETAP dinilai kurang efektif dan masih kurang dapat dipahami oleh UMKM sehingga diperbarui lagi dengan menerbitkan 24 SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah). Exposure Draft SAK EMKM disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016. Beberapa yang membedakan SAK ETAP dengan SAK EMKM yaitu:

1. Ruang lingkup

SAK ETAP memiliki Ruang Lingkup yaitu badan usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, artinya entitas yang tidak memiliki akuntabilitas sektor publik dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk kepentingan publik, Sedangkan Ruang Lingkup SAK EMKM yaitu, di peruntukan untuk entitas Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan entitas yang tidak memiliki tanggung jawab publik yang signifikan . berbedadengan SAK ETAP, SAK EMKM dapat diterapkan pada entitas yang tidak memenuhi semua standar, dengan syarat telah memperoleh izin lembaga yang berwenang.

2. Pengukuran dalam Laporan Keuangan

Dalam SAK EMKM, menggunakan dasar pengukuran biaya historis, artinya semua asset dicatat berdasarkan jumlah kas yang dibayarkan pada saat asset diperoleh atau saat asset tersebut dibeli Setara kas yang diterima atau yang diharapkan akan dibayar untuk membayar kewajiban. Sedangkan dalam SAK ETAP menggunakan pengukuran metode nilai wajar, artinya ditentukan berdasarkan jumlah yang digunakan untuk menukar aset dan menyelesaikan kewajiban antara pihak berpengetahuan dan pihak yang berkepentingan

3. Laporan Keuangan

Dalam SAK EMKM minimal terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan dalam SAK ETAP lebih lengkap yaitu terdapat laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Laporan perubahan perubahan ekuitas

Toko.....		
Laporan Perubahan ekuitas		
Modal Awal,		
Laba bersih,	Xxx	Xxx
Penerunan Modal		
Prive	<u>xxx</u>	
Modal akhir		<u>xxx</u>

Laporan Arus Kas,

Toko.....		
Laporan Arus Kas		
Aktifkas Operasional,		
Laba bersih		Xxx
Penyusutan		Xxx
Piutang Usaha		Xxx
Utang Usaha		Xxx
Persediaan		<u>Xxx</u>
Kas Operasional		Xxx

Investasi	Xxx	
Aktifitas Pendanaan		
Penambahan Modal	<u>Xxxx</u>	
Kenaikan kas		
Kas Per 1 xxx		Xxx
Kas per 31 xxx		Xxx

2.1.4 Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar mensyaratkan penyajian yang jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi serta kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban. Pengungkapan dibutuhkan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas.

Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk informasi untuk mencapai tujuan:

1. Relevan:

Laporan keuangan SAK EMKM dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan.

2. Representasi tepat:

Informasi yang berada dalam laporan keuangan mempresentasikan secara tepat apa yang akan di representasikan dan bebas dari kesalahan material dan bias

3. Keterbandingan:

informasi dalam laporan keuangan entitas dapat di bandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan

4. Keterpahaman

Informasi yang di sajikan dapat dengan mudah di pahami oleh pengguna.

Secara umum, format laporan keuangan UMKM menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Perkembangan UMKM mengacu pada ilmu dasar akuntansi standar, terdiri atas neraca dan laporan laba rugi.

2.1.5 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.5.1 Pengertian UMKM

Pengertian Usaha kecil Menurut UU Nomor 20 tahun 2008, :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih.

Badan Pusat Statistik memberikan definisi UMKM menurut kuantitas tenaga kerja, usaha kecil adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/ KMK.O16/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil dapat didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp600.000.000 (enam ratus juta Rupiah) atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri atas (1) bidang usaha (firma, CV, PT, koperasi) serta (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

Pengelompokkan UMKM ke dalam Empat kriteria, antara lain sebagai berikut :

Livelihood activities : Usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, misalnya Pedagang Kaki Lima (PKL)

Micro Enterprise : Usaha kecil menengah yang sudah memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan

Small Dynamic enterprise : Usaha kecil menengah yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

Fast moving enterprise : Usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha besar.

2.1.5.2 Kriteria UMKM

Karakteristik UMKM berdasarkan asset dan Omzetnya Menurut UU nomor 20 Tahun 2008 :

Table 2. 1
Karakteristik UMKM

Kriteria	Kekayaan bersih	Hasil penjualan tahunan
Usaha mikro	< Rp. 50.000.000	< Rp.300.000.000
Usaha kecil	Rp. 50.000.000 s/d Rp. 500.000.000	Rp. 300.000.000 s/d 2.500.000.000
Usaha Menengah	Rp. 500.000.000 s/d Rp. 10.000.000.000	Rp. 2.500.000.000 s/d Rp. 50.000.000.000
Usaha besar	> Rp. 10.000.000	> Rp. 50.000.000.000

Sumber: David Wijaya (2018)

David Wijaya (2018) Selain itu, berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM juga mempunyai karakteristik tersendiri sebagai berikut.

1. Kualitasnya belum standar. Sebagian besar UMKM belum mempunyai kemampuan teknologi yang memadai dan produk yang dihasilkannya

- biasanya masih berbentuk handmade sehingga standar kualitasnya beragam .
2. Desain produknya terbatas. Ini dipicu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk karena mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan sehingga belum banyak UMKM yang berani mencoba berkreasi desain baru.
 3. Jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM hanya bisa memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya. Kalaupun UMKM menerima akan membutuhkan waktu yang lama.
 4. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Karena mengalami kesulitan dalam menetapkan kapasitas produk dan harga akan membuat konsumen kesulitan pula.
 5. Bahan baku kurang terstandarisasi. Bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda-beda.
 6. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna, Karena produksinya tidak teratur, maka biasanya produk yang dihasilkan sering kali ada.

2.1.6 Dasar Akuntansi UMKM

2.1.6.1 Definisi Akuntansi

Menurut Warsono, Darmawan dan Ridha (2008), Akuntansi didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mengolah transaksi menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pengguna internal pihak eksternal, Oleh karena itu, definisi akuntansi tersebut terdiri atas :

1. Masukan (*input*), yaitu peristiwa bisnis yang bersifat keuangan(transaksi)
2. Proses (prosedur), yaitu berbagai kegiatan untuk mengolah input akuntansi yang dilakukan secara terkoordinasi. Dua proses utama akuntansi ialah pencatatan yang terdiri atas dua fungsi, yaitu penjurnalan dan pemindahbukuan ke buku besar.
3. Keluaran (*output*), yaitu informasi keuangan. Salah satu output dari akuntansi ialah laporan keuangan yang mencakup laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas.

4. Pengguna informasi akuntansi, yaitu pengguna internal (manajer dan karyawan) serta pihak eksternal (pemerintah, pelanggan, dan kreditur).

Akuntansi adalah media komunikasi, oleh karena itu sering disebut sebagai "bahasanya dunia usaha" (business language) (Soemarso, 1999:5 dalam David Wijaya). Akuntansi ditinjau dari sudut kegiatan adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Sedangkan akuntansi ditinjau dari sudut pemakainya adalah sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi (Yusuf, 2011:4).

Menurut *American institute certified of public accounting* (AICPA) dalam buku karangan Ahmad Riahi dan Belkaoui (2006), Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

2.1.6.2 Informasi Akuntansi

Laudon dan laudon (dalam Hendry wijaya, 2018) mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah : suatu komponen yang saling bekerja satu sama lain untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan juga menyebarkan informasi untuk mendukung suatu kegiatan suatu organisasi seperti pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian.

informasi keuangan yang disebut akuntansi manajemen (Mulyadi, 1995 ; Hansen & Mowen, 2005). Informasi akuntansi manajemen disajikan kepada manajemen perusahaan dalam berbagai laporan, seperti anggaran, laporan penjualan, laporan biaya produksi, laporan biaya menurut pusat pertanggungjawaban, laporan biaya menurut aktivitas, dan lain-lain.

Para pengguna informasi dapat memanfaatkan akuntansi informasi untuk berbagai kepentingan. Misalnya, Pemilik UMKM membutuhkan informasi akuntansi agar dapat menilai perkembangan modal yang disetorkan, kreditur membutuhkan informasi akuntansi agar dapat menilai kemampuan UMKM melunasi pinjaman. Dll. Wing Wahyu (2007:1.6) menyatakan bahwa informasi

adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk pembuatan keputusan.

Kegunaan informasi keuangan dapat di tingkatkan jika informasi tersebut terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpaham (*understandable*) (DSAK, 2018). Informasi keuangan yang berkualitas dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan. Semakin baik informasi akuntansi, maka UMKM akan semakin mudah dalam mendapatkan akses kredit pada bank. Sebaliknya, buruknya kualitas informasi akuntansi dapat menimbulkan dampak yang berlawanan terhadap pembuatan keputusan. Pembuat keputusan akan melihat bagaimana informasi yang disajikan dalam laporan untuk menentukan diterima atau ditolaknya pengajuan kredit bank (Herwiyanti dan Sugiarto, 2019)

Eliada dkk. (2020) Kualitas informasi akuntansi adalah tingkat atau derajat pemberitaan terkait laporan-laporan yang berhubungan dengan transaksi keuangan disajikan oleh aktor (akuntan). Semakin tinggi tingkat informasi akuntansi, semestinya juga besar peran akuntan. Meskipun hanya UMKM, tetap keuangannya harus bisa di pertanggungjawabkan agar pengelolaan usaha tidak kacau dengan urusan pribadi pengusaha.

Nelson, Todd, dan Wixom (2005) mengidentifikasi empat dimensi kualitas informasi, yaitu lingkup, ketepatan waktu, format/bentuk, dan akurasi.

1. Lingkup, berkaitan dengan kelengkapan dalam hal mengukur tingkat/derajat di mana semua pernyataan relevan yang memungkinkan disajikan dalam informasi.
2. Ketepatan waktu, berkaitan dengan mata uang yang digunakan untuk mengukur tingkat/derajat di mana informasi itu *up to date*, atau mencerminkan kondisi dunia saat ini.
3. Format/bentuk, berkaitan dengan tingkat/derajat di mana informasi disajikan dalam artian dapat dipahami dan diinterpretasikan untuk pengguna dan membantu dalam melengkapi suatu tugas.
4. Akurasi, berkaitan dengan tingkat/derajat di mana informasi itu benar, tidak ambigu, bermakna, dapat dipercaya dan konsisten.

Dikutip dari Walther dan Skousen (2009) "*Accounting information is the nerus of the decision-making process*" yang berarti bahwa informasi akuntansi adalah perhubungan dari proses pengambilan keputusan. Berdasarkan empat dimensi kualitas informasi yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa

kualitas informasi akuntansi mencakup karakteristik sebagai berikut:

1. Relevan, informasi yang disajikan adalah rangkaian informasi yang tepat sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang benar.
2. Andal, informasi yang disajikan adalah informasi yang tepat, bebas dari kesalahan material dan bias.
3. Dapat dibandingkan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah informasi yang penyajiannya memudahkan penggunaannya untuk melakukan interpretasi data posisi dan kinerja keuangan antar periode maupun antar entitas.
4. Dapat dipahami, informasi yang disajikan adalah informasi yang disampaikan dengan format dan penggunaan istilah yang mudah dipahami penggunaannya.

2.2 Review Hasil-hasil penelitian Terdahulu

Tatik Amani (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa :laporan keuangan belum disusun sesuai SAK EMKM. yang berlaku per 1 Januari 2018, bahwa setiap UMKM yang sudah memenuhi syarat dan akan mengajukan kredit untuk memperbesar modal usahanya ke perbankan wajib menyajikan Laporan Keuangan seperti kaidah dalam SAK EMKM. Laporan Keuangan yang peneliti susun yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyusunan ketiga laporan tersebut disesuaikan dengan aturan dan kaidah-kaidah SAK EMKM.

Keterbatasan

Yuli Rawun dan Oswald N Tumilaar(2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa para Pelaku UMM di kecamatan Malalayan tidak satupun melakukan pencatatan laporan keuangan sederhana maupun sesuai SAK EMKM. Tidak adanya keinginan setiap pelaku UMKM untuk berusaha membuat laporan keuangan dikarenakan waktu dan pengetahuan yang lebih untuk menyusun laporan keuangan.

Hermi Sularsih dan Amar Sobir (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaku UMKM hanya menggunakan pembukuan atau catatan sederhana untuk mencatat keuangan usaha. Alasan Para UMKM tidak Menyusun laporan keuangan karena akuntansi dianggap rumit dan sulit untuk di terapkan serta keterbatasan pemahaman dan keterampilan dalam Menyusun laporan keuangan.

Ari *et al* (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan keuangan yang disusun UMKM masih sangatlah sederhana dan simpel. Laporan keuangan UMKM tersebut mencatat semua biaya yang dikeluarkan selama perusahaan beroperasi sampai saat ini, laporan yang telah disajikan meliputi laporan penjualan, laporan gaji karyawan, laporan pembelian bahan baku, laporan beban-beban, laporan perlengkapan dan laporan peralatan. Meskipun laporan keuangan yang disajikan oleh UMKM sudah meliputi kegiatan usaha selama satu tahun, namun laporan keuangan yang disusun belum sesuai dengan laporan keuangan yang terdapat di SAK EMKM.

Ummu *et al* (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang terdaftar di wilayah peneliti, Tidak Menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Salah satu kendala yang di hadapi, Tidak ada sosialisasi dari instansi terkait, mengenai regulasi kewajiban penerapan SAK EMKM. Pencatatan yang dilakukan masih sangat sederhana.

Siti dan Arif (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa Pencatatan keuangan yang dilakukan oleh UMKM masih bersifat dasar. Pencatatan disusun berdasarkan kemampuan dan pemahaman pengelola. Hasil pencatatan hanya memuat kas masuk dan kas keluar. Kas masuk di catat di posisi debet dan kas keluar di catat di posisi kredit.

Lesi *et al* (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SAK EMKM telah berjalan dengan baik karena Sebagian besar sudah sesuai dengan SAK EMKM. Terdapat dua item yang tidak memenuhi SAK EMKM yaitu, Catatan atas Laporan Keuangan dan laporan laba rugi yang tidak mencantumkan beban pajak.

Fadil dan Tituk (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM tidak menerapkan SAK EMKM. Tidak adanya ilmu akuntansi menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM, dengan koefisien parameter sebesar 0,615 dan p nilai 0,000 (T-Statistika > 1,96 dan nilai p < 0,05). Pemahaman akuntansi juga dapat diklasifikasikan ke dalam prediktor niat kontrol perilaku yang dirasakan ini. Sehingga, semakin banyak pelaku UMKM yang meyakini bahwa mereka memahami akuntansi, maka semakin tinggi peluang mereka akan menerapkan SAK EMKM

Isna *et al* (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM telah melakukan

penerapan SAK EMKM. ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang telah diterapkan, dan dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain ; 1) berisi informasi umum tentang pendirian dan informasi relevan lainnya, 2) Ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan, 3) kas dan setara kas mencakup semua kas dan simpanan yang tidak dibatasi 4) Kolektibilitas piutang perdagangan dan non-perdagangan ditinjau secara berkelanjutan, Hutang yang diketahui tidak dapat ditagih dihapuskan dengan mengurangi jumlah pembawa secara langsung.

Henry dan Suharno (2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM belum melakukan pencatatan laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Umkm tidak mempunyai pemahaman Tentang SAK EMKM. Lebih dari itu Covid-19 mempengaruhi UMKM dalam perdagangan eceran, penyedia makanan dan minuman. Namun UMKM sektor ini lebih menunjukkan ketahanan arus kas dibanding sektor lain.

2.3 Kerangka Teoritis

Berdasarkan penelitian berjudul “analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas, mikro, kecil dan menengah (SAK EMKM) Studi pada UMKM yang terdaftar E-WAROONG di kelurahan kebon bawang.Peneliti Menggambarkan dalam bagan berikut :

Gambar 2. 1

Kerangka Teoritis

